



Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik

Ninin Adeliya Citra

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya

Korespondensi penulis: ininin872@gmail.com

Abstract: Gresik district is experiencing problems with subsidized fertilizer from the government. The scarcity of fertilizer in Gresik district is not only caused by a lack of fertilizer availability, but can also be caused by delays in distribution. Finally, there is a risk of excessive fertilizer use. The purpose of this study is to determine the availability and needs of subsidized fertilizers, evaluate the implementation of fertilizer distribution, and provide recommendations for developing effective and efficient fertilizer distribution in Gresik Regency. This research uses a qualitative method. This research refers to the evaluation theory according to William N Dunn which consists of 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and permanence. The result of this research is that the distribution of subsidized fertilizers has been effective, but there are still a few obstacles to scanning ID cards for the T-PUBRES application. Based on data from the Gresik Regency Agriculture Office, there is no shortage of subsidized fertilizer in Gresik Regency, but indeed the Gresik Regency subsidized fertilizer allocation from the Ministry of Agriculture is only part of the e-allocation. The delivery of subsidized fertilizer to kiosks is also good where the distribution is also in accordance with the policy. The implication of this research is that the Gresik Regency Agriculture Office needs to collaborate with the Gresik Regency Population and Civil Registry Office to improve the KTP of farmers so that it can be read by the REKAN KIOS application to make it easier for farmers to get subsidized fertilizer.

Keywords: Distribution, Fertilizer, Subsidized

Abstrak: Kabupaten Gresik mengalami permasalahan dalam pupuk subsidi dari pihak pemerintah. Kelangkaan pupuk di kabupaten Gresik bukan hanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pupuk, namun juga bisa disebabkan oleh keterlambatan distribusi. Terakhir, ada risiko penggunaan pupuk secara berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi, mengevaluasi pelaksanaan distribusi pupuk, dan memberikan rekomendasi pengembangan distribusi pupuk yang efektif dan efisien di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi menurut William N Dunn yang terdiri dari 6 indikator yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran pupuk subsidi sudah efektif, tetapi masih ada sedikit kendala untuk scan KTP buat aplikasi T-PUBRES. Berdasarkan data Dinas Pertanian kabupaten Gresik tidak ada kekurangan pupuk subsidi di kabupaten Gresik melainkan memang jatah pupuk subsidi kabupaten Gresik dari kementerian pertanian hanya sebagian dari e-alokasi. Pengiriman pupuk subsidi ke kios juga sudah bagus di mana penyalurannya juga sesuai dengan kebijakan. Implikasi penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik perlu melakukan kerja sama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan KTP para petani supaya bisa terbaca oleh aplikasi REKAN KIOS supaya memudahkan para petani untuk mendapat pupuk subsidi.

Kata Kunci: Distribusi, Pupuk, Bersubsidi

LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, sektor pertanian, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani sesuai dengan program pemerintah di sektor pertanian. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV. Jalur I adalah lokasi penyimpanan pupuk yang terletak di area pabrik atau di pelabuhan tempat tiba pupuk impor. Jalur II mencakup gudang pabrikan di dalam satu provinsi atau ibu kota Unit Pengemas Pupuk (UPP) atau di luar area pelabuhan. Jalur III adalah gudang pabrikan dan/atau distributor di kabupaten atau kota yang ditunjuk oleh produsen. Distributor bertanggung jawab untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar sesuai dengan enam prinsip utama: jenis yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan kualitas yang tepat. Jalur IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di kecamatan dan/atau desa yang ditentukan oleh distributor.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai target 100 persen sebesar 6,19 juta ton pada tahun 2023. Pupuk Indonesia berhasil memproduksi 18,8 juta ton, yang terdiri dari 11,6 juta ton pupuk dan 7,1 juta ton non-pupuk. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sebesar 7,85 juta ton, dengan rincian 4,64 juta ton untuk pupuk jenis Urea dan 3,21 juta ton untuk pupuk jenis NPK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 10/2022, di mana pemerintah memfokuskan subsidi pupuk pada dua jenis yaitu Urea dan NPK. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang dibeli dan didistribusikan dengan dukungan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani, sesuai dengan program pemerintah. (Anisa, F., & Adnan, 2021)

Pupuk memainkan peran penting dan strategis dalam meningkatkan hasil dan produktivitas pertanian. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk dilakukan mulai dari tahap perencanaan permintaan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga keputusan mengenai alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Gresik, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor: 520/8/Hk/437.12/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

Tabel 1 Harga pupuk eceran

Jenis Pupuk	Harga
a. Pupuk Urea	= Rp.2.250,00 per kg
b. Pupuk SP 36	= Rp.2.400,00 per kg
c. Pupuk ZA	= Rp.1.700,00 per kg
d. Pupuk NPK	= Rp.2.300,00 per kg
e. Pupuk Organik	= Rp.800,00 per kg
f. Pupuk Organik Cair	= Rp.20.000,00 per liter

Sumber: Keputusan Bupati Gresik Nomor : 520/8 /Hk/437.12/2022

Di Kabupaten Gresik, kebutuhan urea petani yang tercatat dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2022 adalah sebesar 28.724 ton, sedangkan kebutuhan NPK mencapai 29.341 ton. Namun, alokasi urea di Gresik pada tahun 2023 hanya sekitar 26.083 ton, yang hanya mampu memenuhi 91 persen dari kebutuhan petani. Sementara itu, alokasi NPK pada tahun 2023 sebanyak 13.378 ton, hanya mampu memenuhi 46 persen dari kebutuhan petani. (Famela, O., Prayudhi, L. A., Zamrodah, Y., & Widiyatmanta, 2023)

Kelangkaan pupuk di kabupaten Gresik bukan hanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pupuk, namun juga bisa disebabkan oleh keterlambatan distribusi (Bil Haq, 2021). Jika petani tidak membutuhkannya maka pupuk akan berkurang. Bagi petani yang tidak mempunyai modal, tidak bisa membeli pupuk sendiri. Terakhir, ada risiko penggunaan pupuk secara berlebihan (infogresik 2023). Sebab, masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Meskipun sanksi diberlakukan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini, pelanggaran terus berlanjut, sehingga menyebabkan terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi. (K., Rusydiana, T., & Retnoningsih, 2021)

Kebijakan yang diterapkan hingga saat ini belum membuahkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian untuk mengatasi permasalahan terkait penyediaan pupuk bersubsidi di kabupaten Gresik. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan yang lebih efektif.

Kabupaten Gresik mengalami kelangkaan pupuk sampai saat ini memasuki musim tanam tiba, kelangkaan pupuk ini di sampaikan oleh anggota DPRD Jawa timur saat menggelar reses 3 tahun 2023 dalam rangka resap aspirasi masyarakat mengatakan kelangkaan pupuk subsidi masih banyak keluhan sejumlah petani di Kabupaten Gresik, para petani khawatir akan saat musim tanam dan tanamnya membutuhkan pupuk masih terjadi kelangkaan, sehingga hal ini bisa mengganggu tumbuh kembang tanaman. (Riki, R., Abdal, A., & Abdillah, 2022)

Permasalahan distribusi pupuk di Kabupaten Gresik masih belum terselesaikan dan belum ada penelitian yang mendalam mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi, mengevaluasi pelaksanaan

distribusi pupuk, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan distribusi pupuk yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai pilihan atau alternatif dalam proses penyaluran subsidi pupuk di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, judul penelitian yang diambil adalah “**Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik.**”

KAJIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur warga dan mengatasi masalah yang ada. Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh otoritas negara dan mengikat seluruh penduduk negara. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik merujuk pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabatnya (Roni, Y., & Setyawan, 2020). Sementara itu, menurut Woll yang dikutip oleh Tangkilisan (2003;2), kebijakan publik mencakup berbagai aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan sosial.

Proses Kebijakan Publik

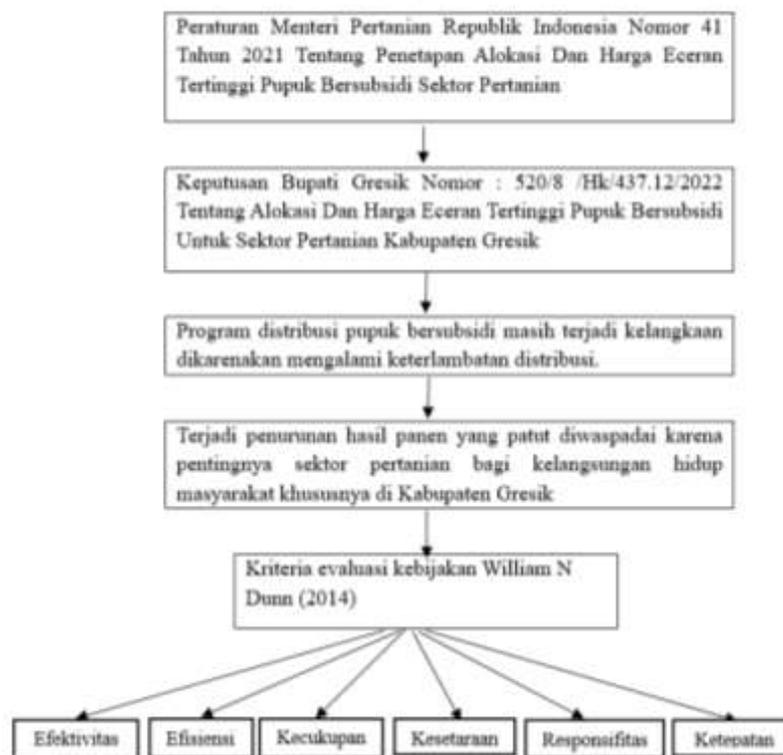
Soebarsono (2005) menyajikan bahwa proses kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam konteks kegiatan politis. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang mencakup penetapan agenda, pembentukan kebijakan, penerimaan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Aktivitas politis yang terlibat dalam proses ini meliputi upaya-upaya untuk mengatur, memformulasikan, mengesahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak pada masyarakat dan kehidupan politik secara keseluruhan. (Tasie, C. M., Wilcox, G. I., Kalio, A. E., & Igilar, 2021). Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan (Safitri, M. A., Supriyono, B., & Ribawanto, 2022).

Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian integral dari proses kebijakan publik di mana dilakukan penilaian terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan (Setiawan Abdillah, 2021). Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi pencapaian dan ketidakberhasilan kebijakan, serta untuk memberikan penilaian berdasarkan pertimbangan nilai tertentu terhadap fenomena yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan publik merupakan upaya sistematis untuk mengukur dampak dan relevansi kebijakan dalam konteks

nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat dan tujuan kebijakan yang diinginkan. (Setiawan, 2023 dalam Mustopadidjaja (2002:45).)

Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur yang dapat diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode penyelidikan fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, serta melaporkan pendapat responden secara rinci. Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi menurut William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang di mana sudah melakukan program subsidi pupuk tetapi masih kekurangan pupuk bersubsidi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian harus dilakukan untuk mengetahui analisis dan hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih informasi yang penting untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan. Tujuannya adalah agar data tersebut mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2020:131) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai kejenuhan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, menghasilkan banyak data. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, merekam semua yang dilihat dan didengar. Dengan cara ini, peneliti akan mengumpulkan data yang sangat banyak dan beragam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data yang diperoleh akan semakin bertambah, menjadi lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah informasi penting, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama untuk menemukan tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan analisis serta menemukan kembali data tersebut jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terlihat, namun menjadi lebih terang dan jelas setelah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik” menggunakan teori evaluasi menurut William N Dunn. Hasil wawancara dan menganalisis kriteria evaluasi menurut William N Dunn ada 6 (enam) tipe kriteria yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas dan ketetapan, setelah melakukan wawancara dan penelitian di lapangan dapat dilihat dalam hasil “Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Subsidi di Kabupaten Gresik” yaitu sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan seberapa berhasil suatu aktivitas, sehingga aktivitas tersebut dianggap efektif jika memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan dalam penyediaan layanan publik, khususnya dalam hal memperoleh alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan dinas pertanian kabupaten Gresik terhadap pendistribusian pupuk subsidi sudah efektif karena memang alokasi dari kementerian pertanian sangat terbatas dan tidak bisa mengcover semua kebutuhan petani hanya bisa memberi sebagian dari RDKK yang di tentukan. Tapi masih ada kekurangan terkait pengimputan mengenai aplikasi T-PUBRES belum sesuai.

Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses "Evaluasi Kebijakan Distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Gresik". Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sudah banyak usaha yang dilakukan dinas pertanian untuk bisa menjalankan kebijakan, dan mengirimkan pupuk subsidi ke kios secara tepat waktu, meskipun ada sedikit keterlambatan pengiriman hal itu bisa dikatakan efisiensi dan sesuai kebijakan penyaluran pupuk subsidi Menurut para narasumber.

Kecukupan

Kecukupan adalah ukuran sejauh mana pencapaian suatu hasil memenuhi harapan yang diinginkan. Dalam konteks ini, hasil yang diinginkan adalah sejauh mana proses kegiatan pembangunan sesuai dengan kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa alokasi distribusi pupuk subsidi sangat di perlukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, meskipun pupuk bersubsidi hanya untuk menutup sebagian dari yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurang cukup untuk menutupi kebutuhan, tetapi pemerintah mengupayakan supaya kebutuhan petani bisa terpenuhi meskipun tidak semuanya.

Perataan

Perataan berkaitan dengan cara suatu kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan dapat menyebar dengan merata dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, berdasarkan kriteria kesamaan manfaat yang diberikan dalam penyaluran pupuk subsidi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Subsidi Kabupaten Gresik” bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah tersalurkan secara merata dan sesuai dengan RDKK, yaitu setiap petani yang mempunyai lahan di bawah 2 hektar mendapat jatah alokasi pupuk subsidi.

Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari berbagai kelompok masyarakat tertentu. Respon petani terhadap proses distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa proses tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kebijakan distribusi pupuk subsidi ini sudah sesuai dengan kebijakan, rutinitas melakukan pertemuan sebelum musim tanam di tingkat kabupaten menjadi salah satu mekanisme untuk mendengar masukan dari para petani dan juga untuk mengetahui alokasi yang ada.

Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pendistribusian pupuk subsidi di kabupaten Gresik diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat karena masih kurang adil untuk penyaluran pupuk bersubsidi. belum ada pengecekan dari pihak pemerintahan dalam memastikan keadilan pupuk subsidi bagi para petani yang mendapatkan jatah sesuai RDKK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa Evaluasi kebijakan distribusi pupuk subsidi dapat disimpulkan bawah penyaluran pupuk subsidi sudah efektif, tetapi masih ada sedikit kendala untuk scan KTP buat aplikasi T-PUBRES. Dinas Pertanian kabupaten Gresik mengatakan bahwa tidak ada kekurangan pupuk subsidi di kabupaten Gresik melainkan memang jatah pupuk subsidi kabupaten Gresik dari kementerian pertanian hanya sebagian dari e-alokasi. Pengiriman pupuk subsidi ke kios juga sudah bagus di mana penyalurannya juga sesuai dengan kebijakan. Untuk kecukupan pupuk subsidi belum terpenuhi karena memang petani sangat membutuhkan dan mereka hanya mengandalkan pupuk subsidi. Proses penyaluran pupuk subsidi sudah tersalurkan kepada petani yang mempunyai lahan di bawah 2 hektar. Rutinitas pengevaluasian antara kios dan distribusi, kios dan anggota Gapoktan

(gabungan kelompok tani) menjadi manfaat dan responsivitas kepada para petani dan dinas pertanian. Proses pendistribusian pupuk subsidi belum dipastikan merata karena belum ada pengecekan dari pihak dinas pertanian langsung kepada petani.

Saran

Dari kesimpulan di atas peneliti memberi masukan saran, untuk Dinas Pertanian Kabupaten Gresik perlu melakukan kerja sama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan KTP para petani supaya bisa terbaca oleh aplikasi REKAN KIOS supaya memudahkan para petani untuk mendapat pupuk subsidi dan tidak terkendala oleh pengevaluasian terhadap para petani untuk memastikan apakah pupuk subsidi sudah tersalurkan sesuai RDKK yang sudah ditetapkan. Perlu adanya pengevaluasian ulang dari dinas pertanian kepada petani langsung untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses distribusi pupuk subsidi.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, F., & Adnan, M. F. (2021). Evaluasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2496>
- Bil Haq, Z. (2021). Akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi (studi kasus Kabupaten Ngawi). *Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers*, 3(2).
- Famela, O., Prayudhi, L. A., Zamrodah, Y., & Widiyatmanta, J. (2023). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonotirto. *Radikula: Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(1). <https://doi.org/10.33379/radikula.v2i01.1898>
- K., Rusydiana, T., & Retnoningsih, D. (2021). Evaluasi distribusi kasus subsidi.
- Riki, R., Abdal, A., & Abdillah, W. S. (2022). Implementasi kebijakan program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2). <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.198>
- Roni, Y., & Setyawan, D. (2020). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2218>
- Safitri, M. A., Supriyono, B., & Ribawanto, H. (2022). Distribusi pupuk subsidi kepada petani tebu dalam perspektif manajemen publik (studi pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 1(1).
- Setiawan Abdillah, W. (2021). Implementasi kebijakan program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2).
- Setiawan, S. (2023). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tasie, C. M., Wilcox, G. I., Kalio, A. E., & Igilar, M. E. (2021). An evaluation of farmers' adoption of yam minisett technology in Agricultural Zone 3, Rivers State, Nigeria. *Journal of Agricultural Science and Practice*, 6(1), 13–18. <https://doi.org/10.31248/jasp2020.245>